Value For Money Pada Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi

Khansa Hamidah Sariyyah [1], Dade Nurdiniah [2,*]

[1,2] Akuntansi; Universitas Bina Insani; Jl. Raya Siliwangi No. 6, Sepanjang Jaya, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat,(021) 82400924; e-mail: khansahamidah5@gmail.com , dade@binainsani.ac.id

* Korespondensi: e-mail: dade@binainsani.ac.id

Diterima: 20 Maret 2024; Review: 22 April 2024; Disetujui: 12 Mei 2024

Cara sitasi: Sariyyah HK, Nurdiniah D. 2024. *Value For Money* Pada Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi. Jurnal Mahasiswa Bina Insani. Vol 9(2): 147 – 158.

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi adanya kendala terkait pelaksanaan APBD sering terjadi pemborosan penggunaan anggaran belanja yang dibelanjakan dan tidak tepat sasaran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi yang diukur dengan menggunakan metode *value for money* yang terdiri atas ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi selama tahun 2020-2022 belum ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonomis yaitu 61,0% dan termasuk dalam kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi tidak efisien karena memiliki rata-rata rasio efisiensi yaitu 111,48%. Dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas sebesar 109,22% yang mana berada dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukan bahwa kinerja keuangan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Kota Bekasi yang diukur berdasarkan *value for money* tergolong belum baik, karena realisasi program yang diukur dari tingkat rasio *value for money* selama tahun 2020-2022 mengalami penurunan setiap tahunnya.

Kata kunci: Pengukuran Kinerja Keuangan, Anggaran, *Value For Money*

Abstract: *This study is motivated by the constraints related to the implementation of the budget often occurs wasteful use of budget spent and not right on target. The purpose of this study is to determine the financial performance of the financial and Asset Management Agency of Bekasi city as measured using the value for money method which consists of economic, efficiency, and effectiveness. The research method used in this research is descriptive quantitative using data collection techniques through documentation studies. The results of this study explain that the performance of the Bekasi city regional financial and Asset Management Agency during 2020-2022 has not been economical because it has an average economic ratio of 61.0% and is included in the less economical category. In terms of efficiency, it is inefficient because it has an average efficiency ratio of 111.48%. And in terms of effectiveness, the average effectiveness ratio of 109.22% which is in the category of very effective. This shows that the financial performance of the Bekasi city regional financial and Asset Management Agency as measured by value for money is not good, because the realization of the program as measured by the value for money ratio level during 2020-2022 has decreased every year.*

Keywords*: Financial Performance Measurement, Budgeting, Value for Money*.

Copyright@2020. LPPM UNIVERSITAS BINA INSANI

1. Pendahuluan

Suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yang terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, akuntabel, serta efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan suatu ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai standar penentuan kebijakan fiskal tahun berikutnya. Pengukuran kinerja yang digunakan oleh organisasi sektor publik, salah satunya adalah dengan menggunakan analisis *value for money*.

Value For Money merupakan konsep yang penting karena intinya dari mengukur hasil kerja sektor publik yaitu mengukur efisiensi, ekonomis, dan efektivitasnya [1]. Elemen efisiensi dan efektifitas perlu dipakai dengan bersamaan dikarenakan dalam salah satu sisi mungkin implementasinya telah dilaksanakan dengan sederhana dan efektif namun Output yang diciptakan tidak tepat sasarannya, sementara pada segi lainnya mungkin program dinyatakan berjalan efektif dan tepat sasaran dan tujuan tapi diraih melalui cara yang tidak ekonomis serta efektif [2].

Seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dalam praktik pemerintahan yang baik, penerapan konsep *value for money* juga semakin dipraktikkan dalam organisasi sektor publik. Konsep *value for money* juga dapat menginformasikan kepada publik tentang apakah pengeluaran anggaran menciptakan nilai bagi masyarakat dan, dalam prosesnya, dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu instansi pemerintah mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga anggaran diimplementasikan [3].

Penyerapan anggaran adalah indikator kesuksesan program ataupun kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan. Program dikatakan mencapai *Cost Effectiveness* ketika program dicapai secara efektif dan efisien. Efisiensi dapat diukur menggunakan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja. Sedangkan SiLPA adalah indikator efisiensi yang terbentuk ketika APBD Surplus dan pembiayaan bersih positif terjadi ketika porsi penerimaan lebih besar dari porsi pembiayaan [4].

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi pada tahun 2020-2022 secara berturut turut mengalami Defisit yaitu realisasi belanja lebih besar dari pada realisasi pendapatan. Secara umum Data pada Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Anggaran dan Realisasi APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi

Tahun Anggaran 2020-2022

Dalam satuan rupiah

Tahun	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2020	249.554.993.426	277.910.141.152	662.715.261.735	461.047.841.957
2021	257.841.500.894	297.493.953.950	533.375.533.451	413.884.340.148
2022	389.372.471.483	392.915.378.884	323.901.322.710	115.601.235.688

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diuraikan bahwa APBD BPKAD Kota Bekasi mulai tahun 2020, 2021 dan 2022 anggaran pendapatan dan belanja mengalami kenaikan diikuti dengan realisasinya. Namun pada tahun 2020, 2021, dan 2022 mengalami Defisit Anggaran yaitu realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan. Dalam hal ini, defisit anggaran dapat dikaitkan dengan adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan. Defisit Anggaran berasal dari besarnya belanja barang dan jasa, dan belanja modal [5]. Terkait, adanya defisit

ISSN: 2528-6919 (Online); 147 - 158

anggaran, maka BPKAD Kota Bekasi harus mampu menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja agar kinerja keuangannya efisien. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah agar memprioritaskann 3 kebijakan termasuk peningkatan *Value For Money*, penganggaran berbasis *Outcome*, dan mementingkan prioritas (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, 2018).

Tabel 2.

Rincian Realisasi Biaya Operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi

Tahun Anggaran 2020-2022

Dalam satuan rupiah

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2020	321.380.444.744	242.199.198.361	75,36%
2	2021	119.854.300.194	101.339.825.712	84,55%
3	2022	148.126.497.143	92.127.391.890	62,20%
	Total	589.361.242.081	435.666.415.963	73,92%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi

Berdasarkan data yang ada biaya operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi mengalami penurunan yang cukup signifikan ini mengidentifikasikan bahwa masih ada program yang belum terlaksana.

Penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh [6] bahwa Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah mencapai kinerja keuangan yang cukup baik dari segi ekonomi dan efisiensi. Namun dalam hal efisiensi yaitu menggunakan dana seminimal mungkin untuk hasil yang maksimal, pemborosan selalu terjadi pada area pembelanjaan barang dan jasa, yang dapat dihindari dengan membelanjakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat maupun biaya pegawai, dapat dihindari dengan mengutamakan perjalanan dinas dan membatasi penyediaan kendaraan dinas baru di seluruh Pemkot Surabaya.

Penelitian yang dilakukan oleh [7] berkaitan dengan mengukur kinerja APBD kota surabaya analisis *value for money*. Penelitian ini menunjukan hasil memberikan hasil yang baik. Selama periode penelitian, rasio ekonomi tetap konsisten dan cenderung meningkat. Untuk rasio efisiensinya menunjukan hasil yang sangat efisien selama rentang periode penelitian, Sedangkan untuk rasio efektivitasnya, cenderung berfluktuasi dalam rentang efektif hingga sangat efektif. Efektivitas anggaran ini tercermin dari realisasi pendapatan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Surabaya lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang dialokasikan.

Penelitian yang dilakukan [8] terkait *value for money analysis* dan akuntabilitas dalam peningkatan pelayanan publik. Kajian ini menunjukkan bahwa operasional Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata bersifat ekonomis, efisien dan efektif. Efektivitas biaya kinerja Dinas semakin meningkat, secara ekonomis mengacu pada perbandingan anggaran (*input*) dengan pelaksanaan anggaran. Ukuran efisiensi yang menggunakan perbandingan masukan dan keluaran. Sedangkan pengukuran kinerja dapat dilihat dari perbandingan hasil dan keluaran dimana nilai hasil merupakan dampak yang dihasilkan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil penilaian akuntabilitas yang diukur dengan LKJIP dan standar akuntansi pemerintahan menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan kegiatannya secara bertanggung jawab.

Penelitian yang dilakukan oleh [9] terkait analisis kinerja sektor publik menggunakan pendekatan value for money di kabupaten OKU bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) kabupaten OKU diklasifikasikan sebagai ekonomis karena berada pada rasio antara 90%-100%, cukup efisien dikarenakan hasil rasio efisiensi menunjukkan antara 80%-90% dan efektif karena tingkat rasio efektivitasnya lebih dari 90%-100%.

BPKAD mempunyai tugas membantu Wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan yang dapat menilai kinerja keuangan dan penting dilakukan, sehingga diangkatlah penelitian dengan judul "Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi ". Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan dengan analisis *value for money* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer
   Data primer Menurut [10] Data primer adalah sumber data penelitian yang didapat secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara. Data primer merupakan sumber utama untuk memperoleh jawaban atas penelitian yang diajukan dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini berupa gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi yang bersumber dari website https://bpkad.bekasikota.go.id/.
2. Data Sekunder
   Data sekunder merupakan data primer sesudah diolah dan data yang bersumber dari laporan yang telah dibuat oleh pihak lain. Menurut [10]. Data sekunder yaitu data-data yang berasal dari perusahaan yang berupa bukti, laporan historis yang tersusun dalam arsip dan hal-hal yang berkenaan materi pembahasan tugas akhir. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data kuantitif berupa Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020-2022.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Dokumentasi. Menurut [10] Metode dekumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat, membaca, mempelajari dan kemudian merekam data yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan untuk mengambil kembali dokumentasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, berupa data Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi.

2.3 Teknik Analisis Penelitian

Analisa data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda. Analisa data yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan melalui beberapa tahapan terhadap dokumen terdahulu menurut [10] .

Pada tahap awal penelitian ini dilakukan pengumpulan data sampel melalui sumber data berupa dokumen laporan keuangan, kemudian data tersebut diolah dan dihitung dengan menggunakan rasio guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi kinerja keuangan. Berdasarkan hasil penelitian [11] menyatakan bahwa kinerja manajemen dapat dilihat melalui laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Hasil perhitungan rasio yang sudah diperoleh kemudian disusun dalam bentuk analisis deskriptif guna menjelaskan makna dari angka-angka yang diperoleh dari hasil perhitungan tersebut. Sejalan dengan hasil penelitian [12].

Dalam hal ini, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode rasio *value for money* dengan membandingkan hasil dari perhitungan rasio terhadap Laporan keuangan Pemerintah Kota Bekasi. Adapun tolak ukur yang dapat digunakan dalam teknik analisis ini adalah:

Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (input) sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang lebih rendah

ISSN: 2528-6919 (Online); 147 - 158

(spending less) atau harga yang mendekati harga pasar. Pengukuran ekonomis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Anggaran Penerimaan}} \times 100\%$$

Sementara, Pengukuran ekonomis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3.

Klasifikasi Pengukuran Ekonomis

Presentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No.600.900-327 Tahun 1996

Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Pengukuran efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Anggaran Penerimaan}} \times 100\%$$

Sementara, Pengukuran efisiensi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.

Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Presentase	Kriteria
100% Keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.600.900-327 Tahun 1996

Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran Efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Anggaran Penerimaan}} \times 100\%$$

Sementara, Pengukuran efektivitas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5.

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

2. Hasil dan Pembahasan

Rasio Ekonomis

Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya sebaiknya dengan harga yang lebih rendah atau harga yang mendekati harga pasar. Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil dari pada anggaran dan dapat mencapai output yang maksimal. Rasio ekonomis sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Perhitungan pengukuran ekonomi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Ketentuan:

1) Jika > 100% termasuk dalam kategori Sangat Ekonomis
2) Jika diantara 90%-100% termasuk dalam kategori Ekonomis
3) Jika diantara 80%-90% termasuk dalam kategori Cukup Ekonomis
4) Jika diantara 60%-80% termasuk dalam kategori Kurang Ekonomis
5) Jika <60% termasuk dalam kategori Tidak Ekonomis

Tabel 6.
Perhitungan Rasio Ekonomis

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio Ekonomis
2020	461.047.841.957	662.715.261.735	70%
2021	413.884.340.148	533.375.533.451	78%
2022	115.601.235.688	323.901.322.710	36%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah

Dilihat dari tabel 6, maka untuk Rasio Ekonomis Anggaran BPKAD Kota Bekasi yang diukur dalam 3 tahun, dimana:

1. Untuk tahun 2020 rasio ekonomis sebesar 70%, termasuk dalam kategori kurang ekonomis

ISSN: 2528-6919 (Online); 147 - 158

karena berada diantara 60% sampai dengan 80%.
2. Untuk tahun 2021 rasio ekonomis mengalami kenaikan menjadi 78%, dan termasuk dalam kategori kurang ekonomis karena berada diantara 60% sampai dengan 80%.
3. Untuk tahun 2022 rasio ekonomis sebesar 36% mengalami penurunan 42% dari tahun sebelumnya dan termasuk dalam kategori tidak ekonomis karena berada kurang dari 60%.

Grafik pengukuran kinerja value for money untuk rasio ekonomis dari tahun anggaran 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Grafik 1.
Perkembangan Rasio Ekonomis BPKAD Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020-2022

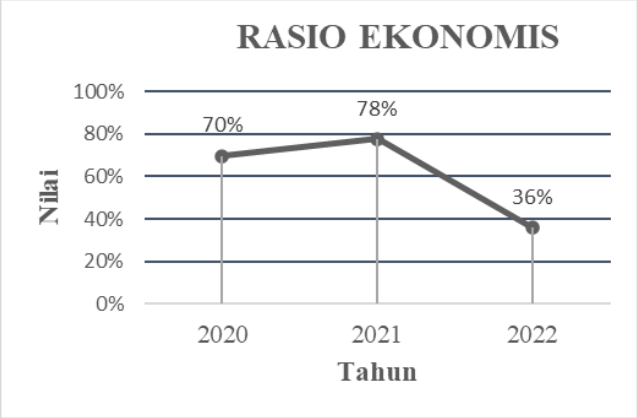

Sumber: Data Penelitian, 2023

Dilihat dari grafik 1 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan pada rasio ekonomis. Rasio ekonomis untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan sebesar 8% yang menyebabkan rasio ekonomis berada dalam kurang ekonomis. Tahun anggaran 2022 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 42% dan termasuk dalam kategori tidak ekonomis. Ini menunjukan bahwa Badan Pengelola Keuangan dn Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi belum disiplin dalam menggunakan anggaran pada saat memulai pelaksanaan program pemerintah dan pada akhir masa pelaksanaannya. Program-program pemerintah banyak terjadi pemborosan pada penggunaan belanja operasi. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, dan belanja bantuan keuangan.

Rasio Efisiensi

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana seminimum mungkin. Efisiensi digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan.

Perhitungan pengukuran efisiensi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Ketentuan:
1) Jika > 100% termasuk dalam kategori Tidak Efisien
2) Jika diantara 90%-100% termasuk dalam kategori Kurang Efisien
3) Jika diantara 80%-90% termasuk dalam kategori Cukup Efisien

4) Jika diantara 60%-80% termasuk dalam kategori Efisien
5) Jika <60% termasuk dalam kategori Sangat Efisien

Tabel 7.
Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio Efisiensi
2020	461.047.841.957	277.910.141.152	166%
2021	413.884.340.148	297.493.953.950	139%
2022	115.601.235.688	392.915.378.884	29%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah

Dilihat dari tabel 7, maka untuk Rasio Efisiensi Anggaran BPKAD Kota Bekasi yang diukur dalam 3 tahun, dimana:

1. Untuk tahun 2020 rasio efisiensi sebesar 166%, termasuk dalam kategori tidak efisien karena lebih dari 100%.
2. Untuk tahun 2021 rasio efisiensi sebesar 139%, mengalami penurunan 27% dari tahun sebelumnya dan termasuk dalam kategori tidak efisien karena lebih dari 100%.
3. Untuk tahun 2022 rasio efisiensi sebesar 29% mengalami penurunan 110% dari tahun sebelumnya dan termasuk dalam kategori sangat efisien karena berada kurang dari 60%.

Grafik pengukuran kinerja value for money untuk rasio efisiensi dari tahun anggaran 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.
Perkembangan Rasio Efisiensi BPKAD Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2020-2022

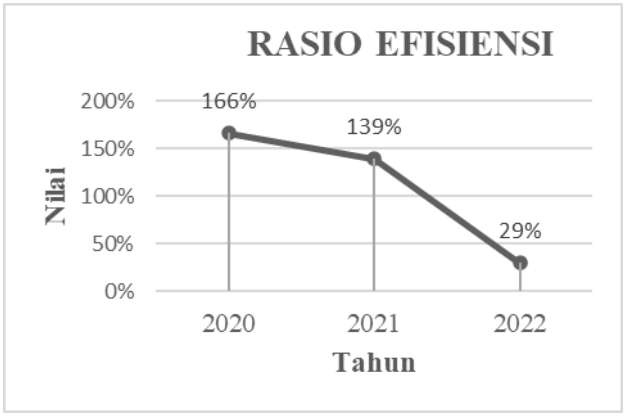

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan grafik 2 perkembangan rasio ekonomis menurun setiap tahunnya. Tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021 mengalami penurunan sebesar 27% dan termasuk dalam kategori tidak efisiensi. Tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 mengalami penurunan sebesar 110% dan termasuk dalam kategori sangat efisien. Melalui analisis rasio efisiensi dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan BPKAD Kota Bekasi. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar belanja daerah yang dikeluarkan oleh BPKAD Kota Bekasi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dapat dikatakan untuk tahun 2020-2022 BPKAD Kota

ISSN: 2528-6919 (Online); 147 - 158

Bekasi belum mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan mengefisiensikan pengeluaran.

Rasio Efektivitas

Perhitungan efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan pendapatan yang direncanakan dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Semakin tinggi rasio efektivitasnya, semakin baik kemampuan daerah.

Perhitungan pengukuran efektivitas dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Anggaran Penerimaan}} \times 100\%$$

Ketentuan:

1) Jika > 100% termasuk dalam kategori Sangat Efektif
2) Jika diantara 90%-100% termasuk dalam kategori Efektif
3) Jika diantara 80%-90% termasuk dalam kategori Cukup Efektif
4) Jika diantara 60%-80% termasuk dalam kategori Kurang Efektif
5) Jika <60% termasuk dalam kategori Tidak Efektif

Tabel 8.

Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio Efektivitas
2020	277.910.141.152	249.554.993.426	111%
2021	297.493.953.950	257.841.500.894	115%
2022	392.915.378.884	389.372.471.483	101%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah

Dilihat dari tabel 8, maka untuk Rasio Efektivitas Anggaran BPKAD Kota Bekasi yang diukur dalam 3 tahun, dimana:

1. Untuk tahun 2020 rasio efektivitas sebesar 111%, termasuk dalam kategori sangat efektif karena lebih dari dari 100%.
2. Untuk tahun 2021 rasio efektivitas sebesar 115%, mengalami kenaikan 4% dari tahun sebelumnya dan termasuk dalam kategori sangat efektif karena lebih dari 100%.
3. Untuk tahun 2022 rasio efektivitas sebesar 101% mengalami penurunan 14% dari tahun sebelumnya dan termasuk dalam kategori sangat efektif karena lebih dari 100%.

Grafik pengukuran kinerja value for money untuk rasio efektivitas dari tahun anggaran 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 9.

Perkembangan Rasio Efektivitas BPKAD Kota Bekasi

Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio Efektivitas
2020	277.910.141.152	249.554.993.426	111%
2021	297.493.953.950	257.841.500.894	115%
2022	392.915.378.884	389.372.471.483	101%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran yang telah diolah

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan pada rasio efektivitas. Rasio efektivitas untuk tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan sebesar 4% yang menyebabkan rasio efektifitas berada dalam kategori sangat efektif. Tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 mengalami penurunan sebesar 14% dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Ini menunjukan bahwa BPKAD Kota Bekasi sangat efekif dalam menjalankan program kerjanya.

Kinerja Keuangan BPKAD Kota Bekasi berdasarkan Rasio Value for Money. Berikut adalah data hasil perhitungan mengenai tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas anggaran pada BPKAD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020-2022:

Tabel 10.

Pengukuran *Value for Money*

Anggaran Pendapatan

BPKAD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	2020	2021	2022	Rata-Rata
Rasio Ekonomis	**70%**	**78%**	**36%**	**61,0%**
Kriteria	Kurang Ekonomis	Kurang Ekonomis	Tidak Ekonomis	Kurang Ekonomis
Rasio Efisiensi	**166%**	**139%**	**29%**	**111,48%**
Kriteria	Tidak Efisien	Tidak Efisien	Sangat Efisien	Tidak Efisien
Rasio Efektivitas	**111%**	**115%**	**101%**	**109,22%**
Kriteria	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif	Sangat Efektif

Sumber: Data Penelitian, 2023

Dari tabel diatas berikut hasil analisis perhitungan mengenai tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas anggaran pada BPKAD Kota Bekasi:

1. Rasio Ekonomis

Rasio Ekonomis kinerja keuangan BPKAD Kota Bekasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 untuk keseluruhan didapatkan rata-rata 61,0% dimana termasuk dalam kategori kurang ekonomis.

2. Rasio Efisiensi

ISSN: 2528-6919 (Online); 147 - 158

Rasio Efisensi kinerja keuangan BPKAD Kota Bekasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 untuk keseluruhan didapatkan rata-rata 111,48% dimana termasuk dalam kategori tidak efisien.

3. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas kinerja keuangan BPKAD Kota Bekasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 untuk keseluruhan didapatkan rata-rata 109,22% dimana termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukan bahwa BPKAD Kota Bekasi sudah berhasil dalam menjalankan program kerjanya, karena realisasi anggaran sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan.

4. Kesimpulan

Rasio ekonomis tidak bisa dikatakan ekonomis karena berdasarkan rasio ekonomi yang dihitung selama 3 tahun belum karena berdasarkan rasio ekonomis yang dihitung selama 3 tahun rata-rata berada diantara 61,0% yang mana masih termasuk dalam kategori kurang ekonomis. Dari segi efisiensi memiliki rata-rata rasio efisiensi yaitu 111,5% yang termasuk dalam kategori tidak efisien. Dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas sebesar 109,2% yang mana termasuk dalam kategori sangat efektif. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan rasio *value for money* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi adalah harus optimal dalam mendapatkan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam meningkatkan hasil kekayaan daerah agar mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat dan penggunaan anggaran belanja daerah dilakukan tepat sasaran untuk memaksimalkan program kerja BPKAD Kota Bekasi, serta menekankan biaya untuk belanja operasi dan meningkatkan belanja modal agar kualitas pelayanan kepada masyarakat seimbang dengan belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Referensi

[1] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Revisi. STIM YPKN, 2019.

[2] M. S. B Seran, “Value For Money : Suatu Analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Subun Bestobe,” *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, vol. 4, no. 1, pp. 94–101, 2021, doi: 10.31334/transparansi.v4i1.1610.

[3] I. M. Sholikhah and N. Khoiriawati, “Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dengan Menggunakan Analisis Value For Money,” *Budg. J. Business, Manag. Account.*, vol. 4, no. 1, pp. 38–54, 2022, doi: 10.31539/budgeting.v4i1.4132.

[4] I. B. P. Rumagit, H. Karamoy, and D. Afandi, “Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Dinas Pariwisata Kota,” *Going Concern J. Ris. Akunt.*, vol. 17, no. 1, pp. 13–22, 2022.

[5] A. Hamid and I. Lamuda, “Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money,” *Gorontalo Account. J.*, vol. 2, no. 1, p. 31, 2019, doi: 10.32662/gaj.v2i1.556.

[6] C. S. Maryanti and A. Munandar, “ANALISIS VALUE FOR MONEY UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2015-2019 JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi),” *JIMEA | J. Ilm. MEA (Manajemen, Ekon. dan Akuntansi)*, vol. 5, no. 3, pp. 2886–2899, 2021.

[7] T. A. Perdana, R. A. Budiantoro, and Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra, “Mengukur Kinerja APBD Kota Surabaya Analisis Value For Money,” *J. Inov.*, vol. 16, no. 2, pp. 339–346, 2020.

[8] A. B. Trilaksono and N. Handayani, “Analisis Value For Money dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Pelayanan Publik,” *J. Lmu Dan Ris. Akunt.*, vol. vol 9 Nor, pp. 1–14, 2020.

[9] Y. Yulitiawati and R. Rusmidarti, “Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Mengunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU,” *Jetap*, pp. 91–109, 2021.

[10] Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Revisi. 2017.

[11] D. Nurdiniah, “LIQUIDITY , PROFITABILITY , SOLVENCY AND GOING CONCERN AUDIT OPINION ACCEPTANCE : THE ROLE OF FIRM SIZE AS A MODERATION LIKUIDITAS , PROFITABILITAS , SOLVABILITAS , DAN PENERIMAAN OPINI AUDIT GOING CONCERN : PERAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMODERASI,” vol. 2, pp. 182–204, 2023, doi: 10.20473/baki.v8i2.43269.

[12] N. Novianti, I. Wijaya, A. Febianingsih, U. Bina, and I. Indonesia, “JoSS : Journal of Social Science THE EFFECT OF RETURN ON ASSET (ROA) AND DIVIDEND POLICY ON THE VALUE OF MANUFACTURING,” vol. 1, no. 2, pp. 88–95, 2022.